KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Sinergi Pemanfaatan PDR dalam Rangka Mendukung Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Bahan Pokok

Erwin Raza
Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Jakarta, 17 Juni 2019

SEKILAS TENTANG CETAK BIRU SISLOGNAS

VISI, MISI, DAN TUJUAN SISLOGNAS

Visi 2025

Locally Integrated, Globally Connected for National Competitiveness and Social Welfare

Misi

1. **Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat** dan peningkatan daya saing produk nasional di pasar domestik, regional, dan global.
2. Membangun simpul simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai dengan Pelabuhan Hub Internasional melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Tujuan

1. Menurunkan biaya logistik, **memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan logistik** sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global dan pasar domestik.
2. Menjamin **ketersediaan komoditas pokok dan strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau** sehingga mendorong pencapaian masyarakat adil dan makmur, dan memperkokoh kedaulatan dan keutuhan NKRI;
3. Mempersiapkan diri untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada tahun 2013, integrasi pasar ASEAN pada tahun 2015, dan integrasi pasar global pada tahun 2020

Sumber: PerPres no 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru SISLOGNAS

MEMBANGUN KONEKTIVITAS EKONOMI DESA, KOTA, DAN PASAR GLOBAL

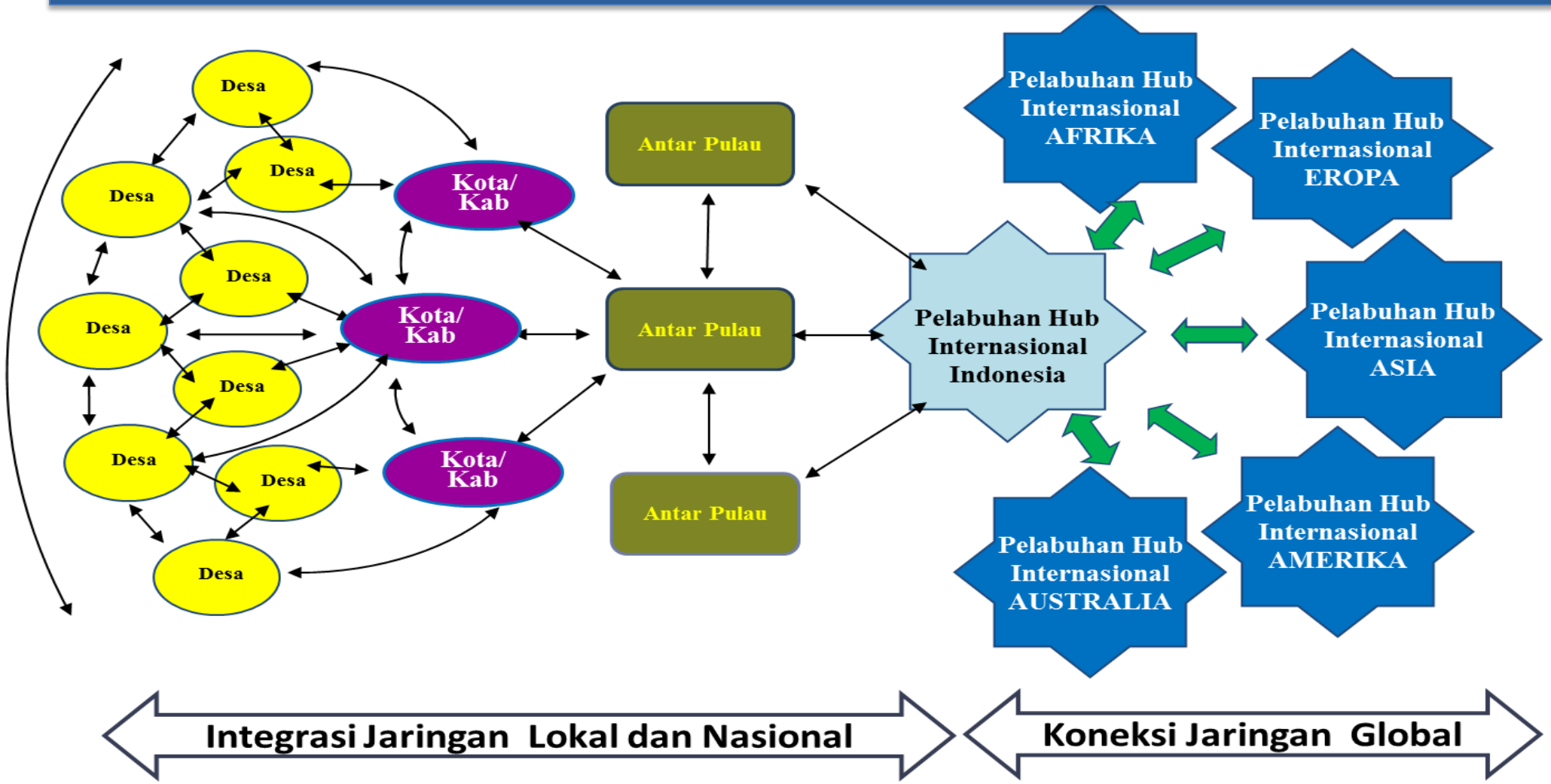

VISI

"Terwujudnya Sistem Logistik yang Terintegrasi secara Lokal, Terhubung secara Global untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat"

6 Kunci Penggerak Utama Pengembangan SISLOGNAS, yang dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif

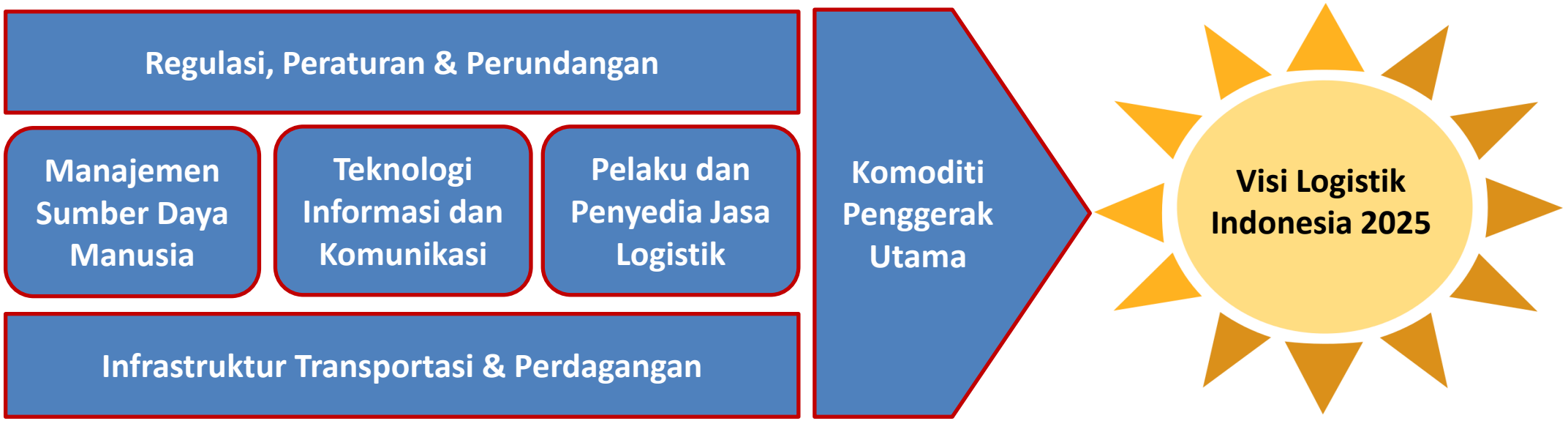

Paradigma:

Ship follow the trade:

- Pengembangan sarana transportasi mengikuti perkembangan dinamika perekonomian wilayah

Ship promote the trade:

- Pengembangan sarana transportasi bertujuan untuk mengembangkan perekonomian wilayah.

PEMBANGUNAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DALAM KERANGKA CETAK BIRU SISLOGNAS

DASAR HUKUM

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 13: Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat

UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pasal 5

- Ayat 1 **Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.**
- Ayat 3(c), Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, paling sedikit mengatur pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat

Pasal 88

- Menteri, gubernur, dan bupati/walikota **berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan** untuk kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Menetapkan Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal **Penyelenggaraan Ketahanan pangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** (Lihat Lampiran UU No. 23 Tahun 2014).

Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

- Menetapkan Sasaran Strategis Dan Program Komoditas Pokok dan Strategis sebagai berikut:
- Sasaran Strategis: **Terjaminnya Ketersediaan dan Kemudahan Mendapatkan Komoditas Pokok dan Strategis** oleh Masyarakat dengan Harga yang relatif stabil dan terjangkau.
- Program meliputi, antara lain pengembangan Pusat Distribusi Regional/Provinsi/Kabupaten.

Perpres Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pasal 3 :

- Ayat 1: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting** di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
- Ayat 2: Menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama dalam **mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**.

Kepres Nomor 23 Tahun 2017 Tim Pengendalian Inflasi Nasional

- **Pasal 4 :** Ayat 1c: Tim Pengendali Inflasi Propinsi mempunyai tugas...c. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada propinsi.
- **Pasal 5 :**Ayat 1c: Tim Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota mempunyai tugas...c. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada kabupaten/kota.

ASPEK KOMODITAS PENGGERAK UTAMA BERDASARKAN CETAK BIRU SISLOGNAS

- Terwujudnya sistem logistik yang mampu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik, regional dan global;
- **Terjaminnya ketersediaan barang, kemudahan mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau dan stabil, serta rendahnya disparitas harga antar wilayah di Indonesia;**
- **Penghela (*driver*) dari seluruh kegiatan logistik;**

Pola	Komoditas Pokok dan Strategis	Komoditas Ekspor	Komoditas Bebas
Jaringan Logistik	➢ Terbentuknya jaringan logistik penyangga yang menjangkau seluruh wilayah NKRI pada setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi; ➢ Jaringan logistik lokal (desa dan kota) terkoneksi dengan jaringan logistik provinsi dan nasional;	➢ Jaringan umum yg menjangkau pusat-pusat produksi, dan terjamin kelancaran arus barang dari daerah asal barang ke Hub Port Internasional secara efektif dan efisien	➢ Jaringan umum yg menjamin kelancaran arus barang dari daerah asal barang ke konsumen secara efektif dan efisien
Tata Niaga	➢ Pemerintah dapat melakukan intervensi pasar baik dari sisi pasokan maupun penyaluran, bila diperlukan	➢ Sesuai mekanisme pasar	➢ Sesuai mekanisme pasar
Tata Kelola	➢ Terkendali dan tidak melanggar rambu-rambu WTO ➢ Arah dan kebijakan dilakukan oleh pemerintah pusat, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan UU Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya	➢ Sesuai mekanisme pasar	➢ Sesuai mekanisme pasar

RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT DISTRIBUSI BERDASARKAN SISLOGNAS

Berfungsi sebagai cadangan penyangga nasional

Pusat Distribusi
Tujuan: memperlancar logistik komoditas pokok dan strategis

Pusat Distribusi **Regional** (PDR)

Pusat Distribusi **Propinsi** (PDP)

Berfungsi sebagai cadangan penyangga propinsi dan penyangga jaringan distribusi kabupaten/kota

Tata Kelola PDR

PDR ditempatkan dan dikelola Provinsi, dengan kriteria:

(i) **jumlah penduduk**,
(ii) **aksesibilitas**,
(iii) **daerah konsumen** (bukan penghasil, bukan daerah produsen),
(iv) **dapat berfungsi sebagai kolektor dan distributor**,
(v) **dekat Pelabuhan Utama**,
(vi) **potensial menjadi pusat perdagangan antar pulau**.

Sumatra
Kuala Tanjung
Padang, Palembang

Kalimantan
Banjarmasin

Sulawesi
Makassar, Bitung

Papua
Sorong, Jayapura

Jawa
Jakarta, Semarang, Surabaya

Nusa Tenggara
Larantuka

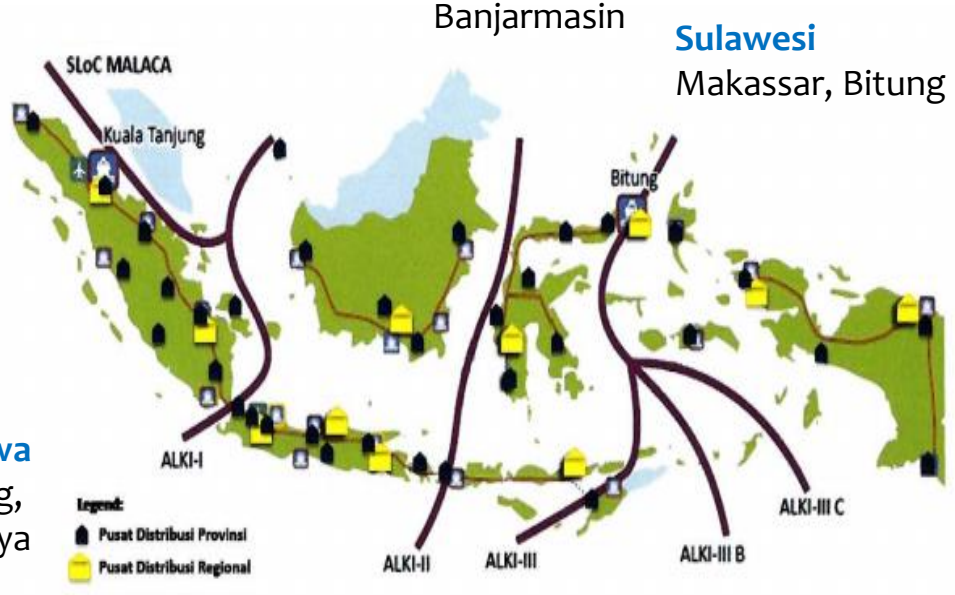

PENGERTIAN PUSAT DISTRIBUSI

Permendag Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015

Pusat Distribusi (PD)

adalah Sarana Perdagangan lainnya yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus barang baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.

Pusat Distribusi Provinsi (PDP)

adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor

Pusat Distribusi Regional (PDR)

adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai cadangan penyangga persediaan (buffer stock) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi nasional yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor, serta dapat dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau.

Karakteristik Pusat Distribusi

PD merupakan salah satu subsistem jaringan yang berfungsi sebagai:

- pusat pelayanan Barang Kebutuhan Pokok/ Penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen, dan memberdayakan masyarakat produsen/petani.
- entitas bisnis yang merupakan pasar grosir (wholesaler market) atau assembly market tempat jual beli produk petani dan jual beli barang pabrikan yang dibutuhkan petani/konsumen khususnya yang berkatian dengan proses produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting/strategis dalam jumlah partai besar.
- penyeimbang dan trend setter harga, serta jaringan penyangga ketersediaan stok Barang Kebutuhan Pokok/ Penting.
- didasarkan atas sistem kemitraan yang berazaskan kemanfaatan bersama.
- salah satu mata rantai sistem rantai pasok Barang Kebutuhan Pokok/ Penting.
- Badan usaha yang mandiri yang dimiliki oleh Pemerintah yang dikelola oleh Operator Pusat Distribusi secara Profesional

FUNGSI PUSAT DISTRIBUSI

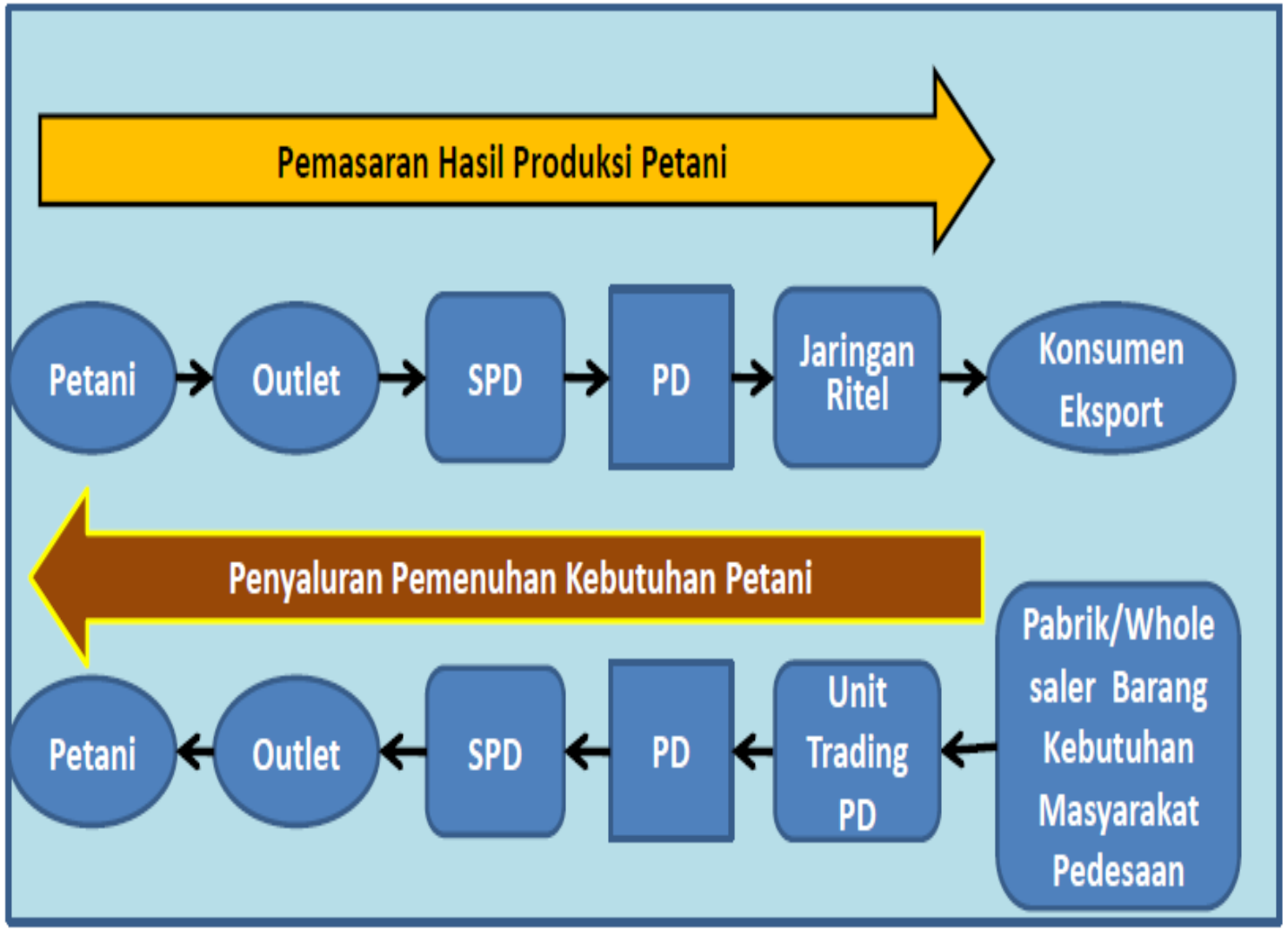

KERANGKA PEMBERDAYAAN

- Memperpendek rantai pemasaran produk petani. Produk petani dapat dijual dengan tingkat harga yang lebih tinggi daripada harga di tempat.
- Memperpendek rantai penyediaan *(supply chain)* barang konsumsi dan saprotan kebutuhan petani, melalui Outlet Pelayanan Petani atau Outlet Mitra.
- Menyediakan cadangan pengaman (*buffer stock*) dengan pembiayaan SRG untuk kestabilan harga di tingkat petani dan jaminan ketersediaan stok bagi konsumen dan Industri Pengolahan.
- Menyediakan bantuan keuangan bagi petani dan pedagang mikro untuk permodalan. PD menjadi penjamin kredit bagi bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Memberikan bantuan, bimbingan dan pembinaan kepada petani untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas petani dengan sistem kemitraan yang didasarkan atas azas kemanfaatan bersama.

AKTIVITAS PUSAT DISTRIBUSI

1. **Penampung (Collector)**
   - Membeli hasil produksi petani, peternak, atau nelayan dan mengolahnya (pengepakan dan penyimpanan) sehingga menjadi produk yang siap dijual kepada konsumen
2. **Pemasar (Marketer)**
   - Memasarkan komoditas hasil produksi Petani baik untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun pasar ekspor.
3. **Grosir (wholesaler)**
   - Mengadakan barang konsumsi dan saprotan kebutuhan petani, peternak, atau nelayan dari pabrikan atau distributor dan menyalurkannya ke masyarakat petani, peternak, atau nelayan melalui Outlet yang tersedia.
4. **Penyedia Jasa Logistik**
   - Menangani aktivitas logistik baik transportasi maupun pergudangan dan inventori
5. **Pelayanan**
   - Melayani kebutuhan Petani
   - Mengkoordinasikan dan menangani seluruh kegiatan bisnis baik yang ada pada Outlet (Wardes, BUMDes, KUD, dsb), Unit Operasi, dan Unit Logistik
6. **Pembinaan dan Kemitraan**
   - Melakukan pembinaan masyarakat petani baik yang terkait dengan budidaya, pasca panen, pemasaran maupun kesejahteraannya.
   - Melakukan pembinaan manajemen bisnis bagi unit usaha pedesaan (Wardes, KUD, BUMDes) agar menjadi usaha bisnis yang modern dan profesional.
   - Menjalin kerjasama kemitraan dengan unit usaha pedesaan/Outlet Mitra (Wardes, KUD, BUMDes) dan Pemda, lembaga keuangan, dan para pihak terkait lainnya

PERKEMBANGAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL

Pembangunan PDR/PDP

Telah terbangun Bangunan Fisik Pusat Distribusi **4 PDR** (dari 12 PDR yang ditargetkan) dan **6 PDP** (dari 22 provinsi di seluruh Indonesia).

- Lokasi 4 PDR yang telah dibangun yaitu di **Palembang, Makassar, Bitung dan Wamena.**
- Lokasi 6 PDP yang telah terbangun yaitu di **Lampung, Mamuju Utara, Kendari, Halmahera Barat, Maluku Tenggara Barat,** dan **Keerom.**

KENDALA

- Belum ada konsep bisnis yang jelas dan pengelolaan pusat distribusi
- Belum ditetapkan manajemen pengelola pusat distribusi sedangkan PDR perlu dikelola oleh manajemen yang profesional dan berpengalaman dalam bidang distribusi dan pergudangan

Beberapa Pertanyaan Penting

Aspek Kelembagaan

- Apa bentuk kelembagaan/badan usaha dalam Pusat Distribusi Regional?
- Seperti apa konsep Pusat Distribusi Regional?
- Seperti apa tata kelola dan tata niaga Pusat Distribusi Regional?
- Bagaimana sumber pembiayaan Pusat Distribusi Regional?
- Bagaimana struktur organisasi di dalam Pusat Distribusi Regional?
- Dari mana sumber daya manusia Pusat Distribusi Regional?

Aspek Bisnis

- Bagaimana model bisnis pada Pusat Distribusi Regional?
- Komoditas apa saja yang diperdagangkan di Pusat Distribusi Regional?
- Bagaimana penggunaan/implementasi ICT dalam kegiatan di Pusat Distribusi Regional?
- Seperti apa system ICT yang disediakan oleh Pusat Distribusi Regional?
- Bagaimana hubungan Pusat Distribusi Regional dengan supplier dan distributor?
- Bagaimana infrastruktur dasar PDR (misalnya: operasional pergudangan serta distribusi transportasi yang ada di Pusat Distribusi Regional)?

Contoh Model PASKOMNAS (Pasar Komoditi Nasional)

PASAR KOMODITI NASIONAL (PASKOMNAS)

Pasar Induk Berjaringan Berbasis Sistem

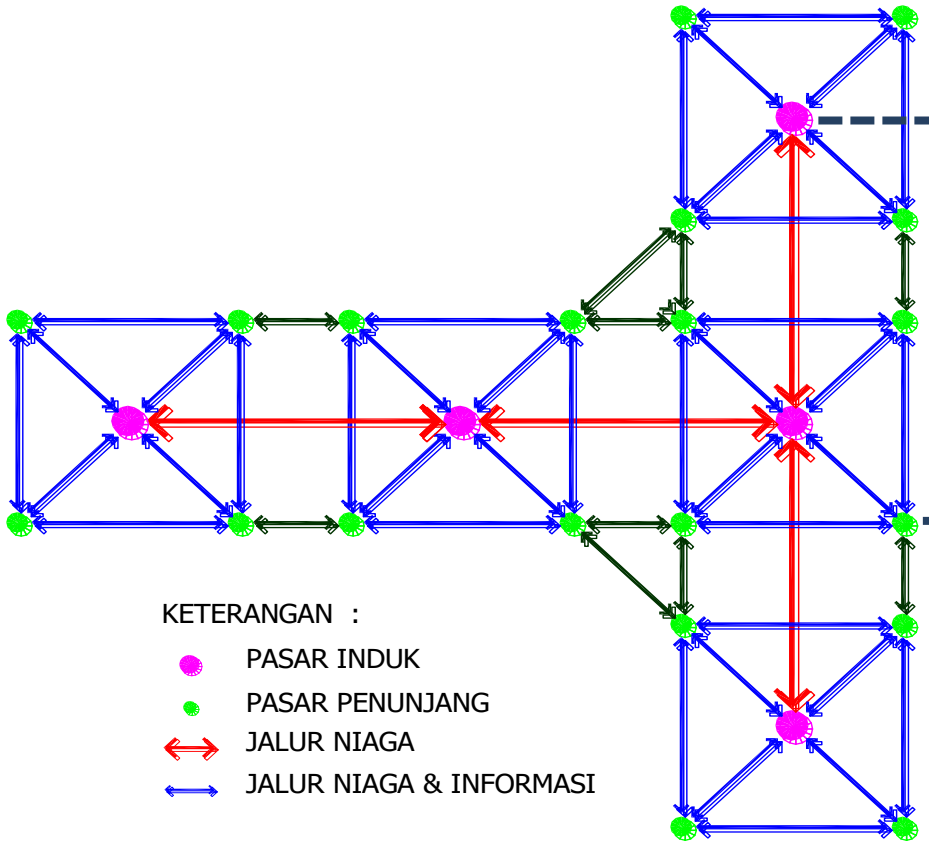

PASAR INDUK BERJARINGAN
(pusat)

- Menyediakan informasi pasar
- Mengendalikan pasokan
- Mendistribusi cepat kelebihan produk

KAWASAN SENTRA PRODUKSI
(daerah)

- Menerima informasi pasar
- Mengatur pola panen
- Mengatur distribusi/ pasokan ke-pasar2 induk

- **pasokan stabil sesuai permintaan pasar → harga stabil**
- **komoditi menjadi "mapan" dikonsumen → menguasai pasar**
- **Inflasi terkendali**

Jaringan Agribisnis Paskomnas

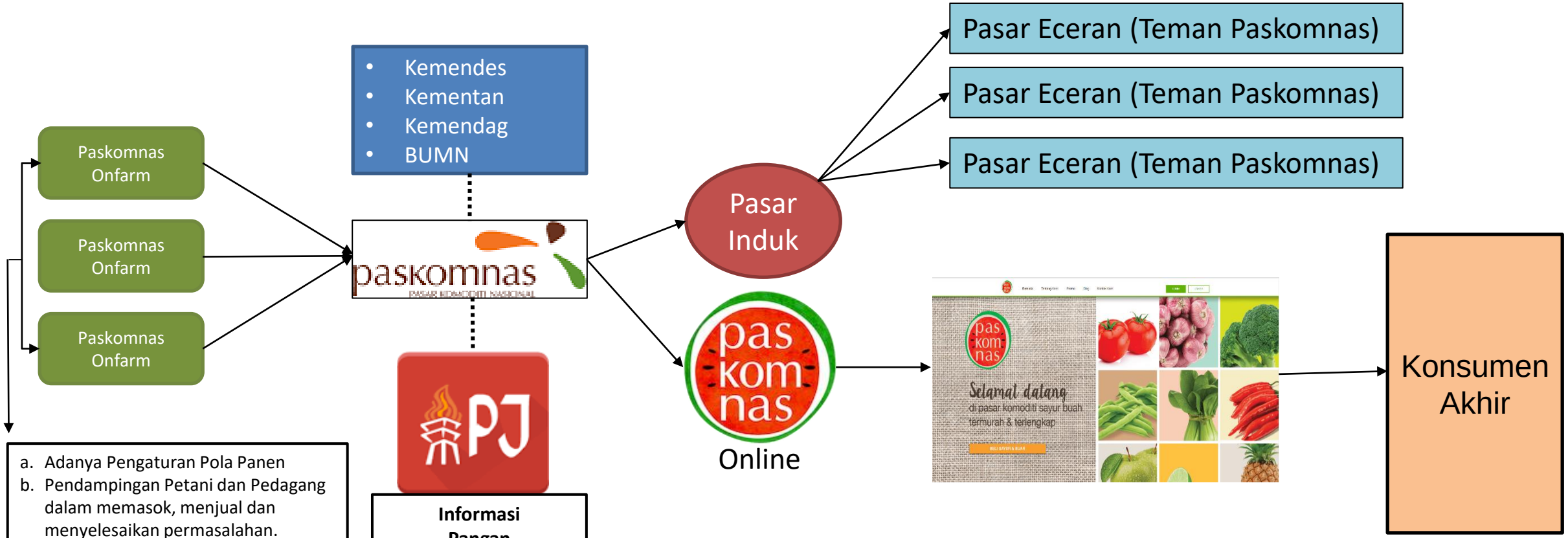

a. Adanya Pengaturan Pola Panen
b. Pendampingan Petani dan Pedagang dalam memasok, menjual dan menyelesaikan permasalahan.
c. Bekerjasama dengan mitra jaringan paskosmnas

Informasi Pangan Jakarta
(Bekerjasama dengan **Pemprov DKI** dalam pengembangan aplikasi IPJ (khususnya komoditas sayur dan buah

Catatan:

- **Adanya Sistem Transfer Komoditas antar Pasar Induk (oleh Manajemen Paskomnas)**

Paskomnas membantu produsen dalam memotong mata rantai

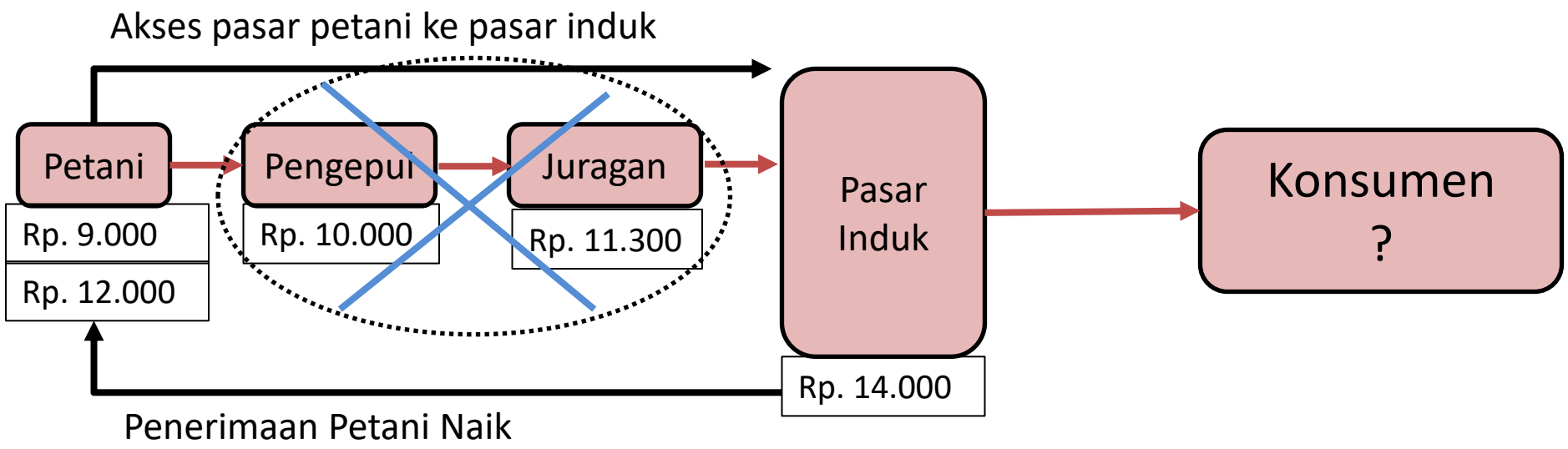

Permasalahan:

- Tidak memahami arti “merebut pasar”, mutu, harga, kontinyuitas
- Daya saing produk rendah, pengalaman terbatas
- Modal terbatas

LOKASI PASKOMNAS

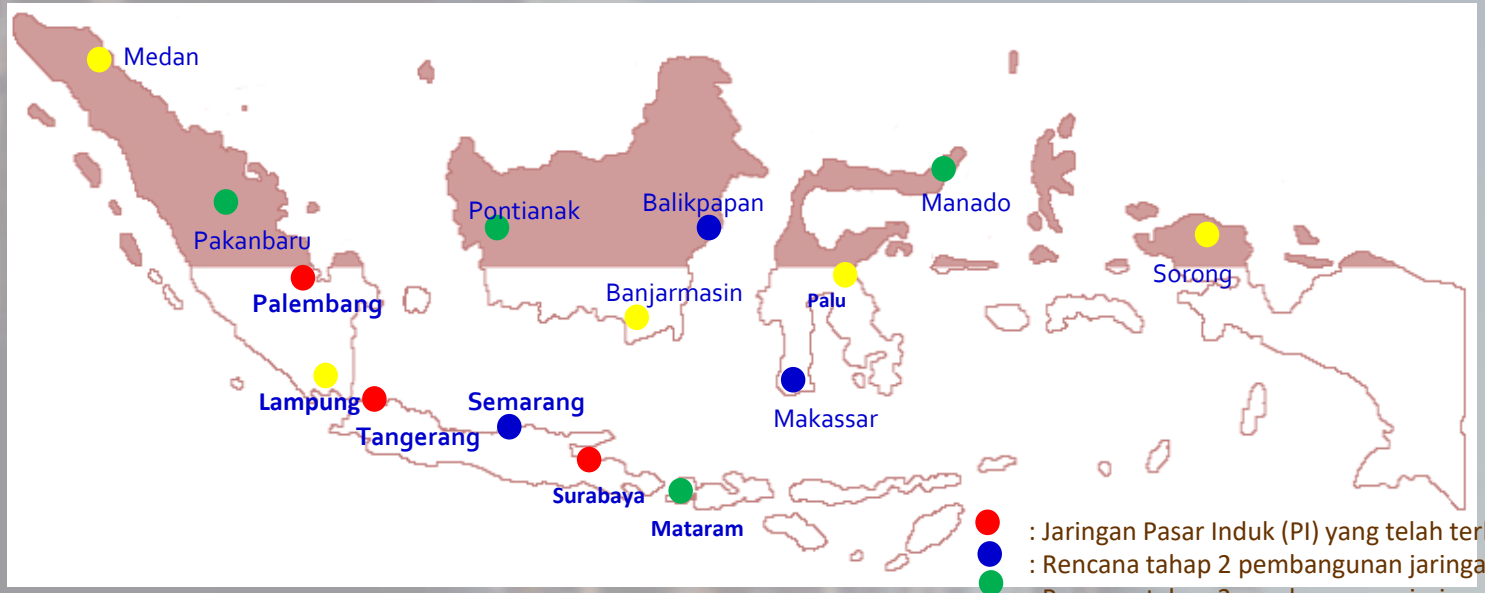

: Jaringan Pasar Induk (PI) yang telah terbangun
: Rencana tahap 2 pembangunan jaringan PI
: Rencana tahap 3 pembangunan jaringan PI
: Rencana tahap 4 pembangunan jaringan PI

Pengelola Jaringan Pasar Induk Terintegrasi

Jakabaring Palembang

Tanah Tinggi Tangerang

Osowilangun Surabaya

Pemetaan Pasar Induk Paskomnas

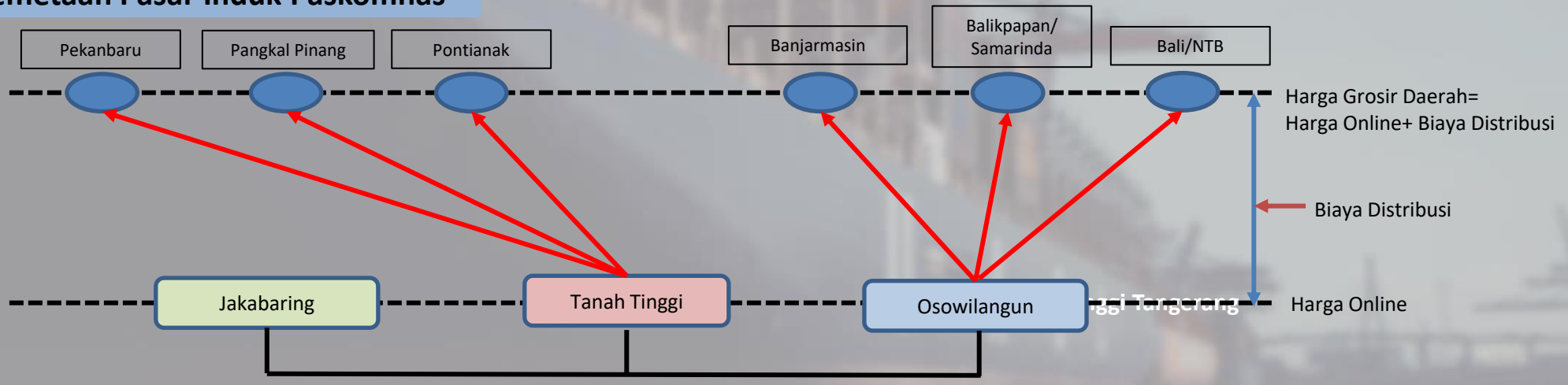

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

TERIMA KASIH

...Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya....
[W.R Supratman]

FOR BETTER INDONESIA